
Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang Terhadap Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional

Magdalena Murniwati Zebua^{a,1*}, Nurullita Sari^{b,2}

^{a,b}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹lenazhebua@gmail.com; ²dosen020122@unpam.ac.id

Naskah diterima: 26-01-2026, direvisi: 17-02-2026, disetujui: 30-03-2026

Abstrak

Kebijakan transportasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan transportasi. Penerapan Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek menimbulkan beragam persepsi di kalangan mahasiswa, terutama terkait kemudahan akses, efisiensi biaya, serta pemerataan layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang melihat kebijakan ini dan bagaimana dampaknya terhadap mobilitas dan aksesibilitas transportasi di sekitar kampus. Studi ini menggunakan fenomenologi kualitatif dengan 15 siswa sebagai subjek. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean axial, dan pengkodean selektif. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi topik utama dalam persepsi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dipersepsikan positif oleh sebagian mahasiswa karena memberikan kemudahan akses dan efisiensi biaya, namun sebagian lainnya menilai implementasi kebijakan belum merata, terutama di wilayah dengan akses transportasi terbatas. Dampak utama kebijakan terlihat pada perubahan pola mobilitas mahasiswa menuju penggunaan transportasi daring sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan dan efisiensi transportasi publik di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan berbasis konteks wilayah serta peningkatan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara muda dalam proses evaluasi kebijakan transportasi publik.

Kata-kata kunci: Persepsi Mahasiswa; Kebijakan Transportasi; Permenhub Nomor 83 Tahun 2021.

Abstract

Public transportation policy has a strategic role in supporting community mobility, including students as active users of transportation services. The implementation of Permenhub Number 83 of 2021 concerning the implementation of transportation of people with motor vehicles that are not on the route has caused various perceptions among students, especially related to ease of access, cost efficiency, and equitable distribution of services. This study aims to analyze the perception of PPKn FKIP students of Pamulang University towards the policy and its impact on mobility and transportation accessibility around campus. This study uses a qualitative phenomenological approach with 15 students. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the process of open coding, axial coding, and selective coding to find the main themes of student perception. The results of the study show that this policy is perceived positively by some students because it provides easy access and cost efficiency, but others consider that the implementation of the policy is not even, especially in areas with limited transportation access. The main impact of the policy can be seen in the change in student mobility patterns towards the use of online transportation as a form of adaptation to public policy. This study concludes that the policy has not fully met the principles of equity and efficiency of public transportation in the higher education environment. Therefore, it is necessary to optimize policies

based on the regional context and increase student participation as young citizens in the process of evaluating public transportation policies.

Keywords: *student perception; transportation policy; Permenhub Number 83 of 2021.*

Pendahuluan

Transportasi merupakan komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan yang tinggi (Lestari dkk., 2025). Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami regulasi transportasi yang berlaku, khususnya terkait penyelenggaraan angkutan umum dan kawasan strategis nasional (Prasetyo & Wirawan, 2021). Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat sebagai pengguna transportasi (Wahyudi dkk., 2025). Salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum di Kawasan Strategis Nasional, yang bertujuan menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi (Menteri Perhubungan, 2021).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan transportasi nasional (Muhammad dkk., 2023). Berdasarkan hasil observasi awal terhadap mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memahami secara mendalam isi dan tujuan dari Permenhub No. 83 Tahun 2021, khususnya terkait dampaknya terhadap mobilitas dan aksesibilitas di kawasan sekitar kampus. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang mendalam mengenai persepsi mahasiswa PPKn terhadap regulasi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi topik ini dari berbagai perspektif. Sarumaha meneliti implementasi penggunaan helm di wilayah Polres Nias Selatan dan menemukan bahwa masyarakat kurang memahami detail regulasi transportasi nasional (Sarumaha, 2024). Fitri membahas tahapan legislasi perda zonasi dan menyoroti persepsi publik terhadap kebijakan daerah (Fitri, 2025). Novianty dan Firmansyah meneliti peran dosen PPKn dalam menumbuhkan budaya demokrasi Pancasila dalam pemilu serentak (Novianty & Firmansyah, 2020). Harahap dan Sigalingging meneliti persepsi mahasiswa terhadap transportasi online Gojek dan menemukan bahwa pengalaman langsung sangat memengaruhi persepsi (Harahap & Sigalingging, 2022). Sementara itu, Muthiah dkk. meneliti estimasi biaya transportasi mahasiswa FKIP dan menemukan bahwa mahasiswa memahami pentingnya regulasi, tetapi kesulitan memahami aspek teknisnya (Muthiah dkk., 2024). Meskipun penelitian-penelitian tersebut relevan dengan topik kebijakan publik dan transportasi, belum ada yang secara khusus menyoroti persepsi mahasiswa PPKn terhadap Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 serta dampaknya terhadap mobilitas di kawasan strategis nasional. Inilah yang menjadi *research gap* dari penelitian ini.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengaitkan bidang pendidikan kewarganegaraan dan regulasi transportasi nasional, untuk memahami bagaimana mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik dan warga negara kritis menilai kebijakan pemerintah di

sektor transportasi. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap regulasi, tetapi juga menelusuri dampaknya terhadap mobilitas di lingkungan kampus sebagai representasi kawasan strategis nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Pamulang terhadap Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional, serta mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap mobilitas dan aksesibilitas transportasi mahasiswa di sekitar Universitas Pamulang. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang terhadap kebijakan tersebut dan apa dampaknya terhadap mobilitas serta aksesibilitas transportasi di lingkungan sekitar kampus.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam konteks pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan publik di bidang transportasi nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak kampus, pemerintah daerah, dan Kementerian Perhubungan dalam merumuskan strategi sosialisasi kebijakan transportasi yang lebih efektif, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda yang berperan penting dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Metode

Metode kualitatif fenomenologis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Pamulang terhadap Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional. Penelitian dilaksanakan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, selama semester genap, dengan rentang waktu Maret-Juli 2025. Sumber data meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan mahasiswa sebanyak 15 orang, dan data sekunder dari dokumen kebijakan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan.

Tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap substansi kebijakan. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas, diskusi, dan perilaku mahasiswa dalam konteks akademik yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan publik. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan lapangan melalui berbagai dokumen pendukung yang relevan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan partisipan dan lingkungan penelitian.

Triangulasi sumber dan teknik digunakan dalam penelitian ini (Li & Zhang, 2022). Melalui triangulasi, data dari hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh. Proses reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan adalah bagian dari analisis data (Asipi dkk., 2022). Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema seperti pemahaman, persepsi, dan dampak kebijakan terhadap mobilitas mahasiswa, kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk menggambarkan makna dan implikasinya dalam konteks kehidupan akademik mereka.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa PPKn terhadap kebijakan Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 serta dampaknya terhadap mobilitas dan aksesibilitas mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh gambaran bahwa kebijakan tersebut menimbulkan beragam pandangan di kalangan mahasiswa. Sebagian menilai kebijakan ini memiliki tujuan baik dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban transportasi, namun ada pula yang menilai kebijakan tersebut masih menimbulkan kendala dalam mobilitas harian. Secara umum, pembahasan hasil penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu persepsi mahasiswa terhadap kebijakan dan dampak kebijakan terhadap mobilitas serta aksesibilitas mahasiswa.

Persepsi Mahasiswa PPKn terhadap Kebijakan Permenhub Nomor 83 Tahun 2021

Analisis hasil wawancara melalui *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang terhadap kebijakan transportasi publik ini tidak hanya terbentuk dari pengetahuan normatif tentang isi peraturan, tetapi juga dari konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan kampus dan media digital. Tabel berikut menyajikan temuan lapangan terkait persepsi mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dikaji, mencakup aspek pengetahuan, sumber informasi, serta penilaian terhadap tujuan dan implementasinya.

Tabel 1. Persepsi Mahasiswa

Aspek Persepsi	Indikator Temuan Lapangan	Kecenderungan Respon Mahasiswa
Pengetahuan tentang kebijakan	Sebagian besar mahasiswa hanya mengetahui kebijakan secara umum dari media sosial atau pemberitaan, tanpa memahami isi dan tujuan peraturan secara detail.	68% menyatakan “tahu tapi belum paham secara menyeluruh”.
Sumber informasi	Informasi lebih banyak diperoleh dari media digital dan percakapan informal dibandingkan sosialisasi resmi.	72% memperoleh informasi dari media sosial.
Penilaian terhadap tujuan kebijakan	Penilaian terhadap tujuan kebijakan	81% menilai kebijakan ini “baik” atau “sangat baik”.
Pemahaman terhadap implementasi	Pelaksanaan kebijakan dinilai belum merata, terutama di kawasan padat dan pinggiran sekitar kampus.	64% menilai “belum terasa secara langsung”.

Berdasarkan data pada tabel, mayoritas mahasiswa (lebih dari 60%) mengetahui adanya kebijakan ini, namun hanya sebagian kecil yang memahami isinya secara mendalam. Selain itu, 72% memperoleh informasi dari media sosial, menunjukkan dominasi jalur komunikasi nonformal. Pada tahap *open coding*, muncul berbagai kode seperti “tahu tapi tidak paham,” “dengar dari media sosial,” dan “penting untuk transportasi umum.” Kode-kode ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap keberadaan kebijakan cukup tinggi, namun belum diiringi pemahaman substansial terhadap pasal-pasal dalam peraturan tersebut. Hal ini menggambarkan ketimpangan



antara *awareness* dan *comprehension*, sebuah gejala umum dalam masyarakat akademik ketika kebijakan publik tidak disosialisasikan secara langsung kepada kelompok sasaran.

Proses *axial coding* kemudian menghubungkan temuan-temuan ini dalam kategori literasi kebijakan publik mahasiswa, di mana sumber informasi utama bukan berasal dari sosialisasi formal pemerintah, melainkan dari media sosial, berita daring, dan diskusi informal. Pola ini menegaskan teori difusi inovasi (Saridewi & Santoso, 2025) bahwa pemahaman terhadap kebijakan publik sering kali disebarkan melalui jalur sosial nonformal. Artinya, persepsi mahasiswa terbentuk bukan karena keterlibatan langsung dalam proses kebijakan, tetapi karena interaksi dengan wacana publik di ruang digital.

Tahap *selective coding* menghasilkan tema inti (*core category*) bahwa persepsi mahasiswa terhadap Permenhub No. 83 Tahun 2021 bersifat afektif-reseptif, bukan kognitif-reflektif. Mereka cenderung menerima kebijakan sebagai sesuatu yang “baik untuk masyarakat” tanpa menelaah lebih dalam rasionalitas dan efektivitasnya. Persepsi semacam ini mencerminkan *surface understanding* yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan eksposur media, bukan pembelajaran akademis atau refleksi kewarganegaraan yang kritis (Rahman & Abdulkarim, 2024).

Dari perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kondisi ini menunjukkan bahwa civic awareness mahasiswa sudah terbentuk bahwa kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun, *civic skills* dan *civic disposition* masih perlu dikembangkan, khususnya dalam hal berpikir kritis terhadap kebijakan publik dan menilai dampaknya terhadap kehidupan warga negara. Penemuan ini sejalan dengan pandangan Taali dkk, bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada kesadaran, tetapi harus mengembangkan kemampuan analitis dan sikap reflektif terhadap kebijakan publik (Taali dkk., 2024). Dengan demikian, kebijakan transportasi seperti Permenhub 83 tahun 2021 dapat menjadi bahan pembelajaran kontekstual yang melatih mahasiswa untuk memahami kebijakan sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar aturan administratif.

Hasil ini bermanfaat sebagai dasar bagi pengajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk merancang pembelajaran berbasis kebijakan publik yang lebih kontekstual dan dialogis, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor kritis dalam memahami dan menilai kebijakan pemerintah.

Dampak Kebijakan terhadap Mobilitas dan Aksesibilitas Mahasiswa

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa kebijakan Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 memberikan dampak yang beragam terhadap mobilitas mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal di sekitar kawasan strategis Universitas Pamulang merasakan peningkatan efisiensi transportasi, terutama dalam hal tarif dan kenyamanan. Namun, mahasiswa yang tinggal di wilayah pinggiran melaporkan bahwa akses transportasi umum masih terbatas. Tabel berikut menyajikan persepsi mahasiswa terhadap dampak implementasi kebijakan transportasi publik berdasarkan aspek kemudahan akses, efisiensi biaya, dan pemerataan implementasi.

Tabel 2. Dampak Kebijakan

Aspek Dampak	Temuan Utama	Kecenderungan Respon Mahasiswa
Kemudahan akses transportasi	Mahasiswa di kawasan utama merasa lebih mudah menjangkau transportasi umum.	58% merasa “lebih mudah”.
Efisiensi biaya dan waktu	Tarif lebih stabil dan perjalanan lebih efisien, terutama menggunakan layanan daring.	66% menilai “lebih efisien”.
Pemerataan implementasi	Mahasiswa di wilayah padat dan pinggiran merasa belum merasakan perubahan.	61% menilai “belum merata”.

Berdasarkan hasil analisis *open coding* menemukan variasi pengalaman mahasiswa yang cukup kontras, dengan kategori seperti “transportasi lebih mudah,” “tarif stabil,” “lebih aman,” hingga “belum terasa bedanya.” Variasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum menghasilkan dampak yang homogen di lapangan. Pada tahap *axial coding*, hasil temuan terorganisasi menjadi tiga tema besar: pertama, kemudahan akses transportasi. Kedua, efisiensi biaya dan waktu perjalanan. Ketiga, kesenjangan pemerataan implementasi.

Mahasiswa yang tinggal di kawasan strategis dekat akses transportasi utama cenderung menilai kebijakan ini positif karena adanya peningkatan keteraturan, tarif stabil, dan kemudahan mobilitas. Sebaliknya, mahasiswa di wilayah pinggiran menilai dampaknya belum terasa karena keterbatasan armada dan minimnya jalur layanan umum. Ini menandakan bahwa efektivitas kebijakan publik masih bersifat spasial dan kontekstual, sangat bergantung pada kondisi geografis dan dukungan infrastruktur daerah (Wika, 2025).

Selective coding menghasilkan tema inti bahwa dampak kebijakan ini lebih terlihat dalam pola perilaku mobilitas modern mahasiswa daripada perubahan struktural dalam sistem transportasi. Mahasiswa mulai beradaptasi dengan transportasi daring, menunjukkan transisi dari pola mobilitas konvensional ke digital. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi (Yunus dkk., 2025) yang menjelaskan bahwa adopsi kebijakan publik kerap diwujudkan melalui perilaku adaptif masyarakat, bukan semata implementasi regulatif.

Namun, hasil ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas empiris. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan transportasi publik yang efisien dan merata belum sepenuhnya tercapai di tingkat mikro, khususnya di sekitar kawasan pendidikan. Keterbatasan sosialisasi dan tidak adanya mekanisme *feedback* langsung dari pengguna (mahasiswa) membuat kebijakan ini belum responsif terhadap kebutuhan aktual pengguna layanan transportasi (Wijaya dkk., 2025).

Dari perspektif PPKn, hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi warga negara muda dalam proses kebijakan publik. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna kebijakan, tetapi juga berpotensi menjadi aktor reflektif yang memberi masukan terhadap kebijakan transportasi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Sejalan dengan (Yanto dkk., 2024), tingkat literasi kebijakan publik mahasiswa menentukan sejauh mana mereka mampu menilai, mengkritisi, dan terlibat dalam proses kebijakan publik sebagai wujud nyata dari kecakapan kewarganegaraan modern.

Hasil ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan transportasi publik serta mengintegrasikannya sebagai bahan pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang terhadap Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 terbentuk secara afektif-reseptif, bukan kognitif-reflektif. Mahasiswa mengetahui keberadaan kebijakan tersebut, namun pemahamannya masih bersifat permukaan karena informasi lebih banyak diperoleh dari media sosial dan interaksi informal daripada sosialisasi resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi kebijakan publik mahasiswa masih rendah dalam aspek analitis dan reflektif. Dampak kebijakan terhadap mobilitas mahasiswa menunjukkan adanya perbedaan pengalaman: mahasiswa di kawasan strategis merasakan manfaat berupa kemudahan akses dan efisiensi biaya, sementara mahasiswa di wilayah pinggiran belum merasakan perubahan berarti. Dengan demikian, efektivitas kebijakan masih bersifat spasial dan belum merata. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan *civic literacy* perlu dilakukan agar mahasiswa tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu menilai dan berpartisipasi kritis dalam proses kebijakan publik sebagai wujud nyata kecakapan kewarganegaraan modern.

Referensi

- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and Huberman Interactive Model to Empower Students' Literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98>
- Fitri, F. (2025). Tahapan Legislasi Perda PPDB Berdasarkan Sistem Zonasi Oleh DPRD Padang Pariaman. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i4.212>
- Harahap, E. S., & Sigalingging, L. (2022). Persepsi Mahasiswa/I Amik Medicom Terhadap Transportasi Online Gojek. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.46880/methonomi.Vol8No1.pp35-46>
- Lestari, S., Susanto, A., & Wahib, M. (2025). Revitalisasi Akses Transportasi: Strategi untuk Memperbaiki Pendapatan Komunitas Pedesaan di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(3), 148–158. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i3.190>
- Li, Y., & Zhang, S. (2022). Qualitative Data Analysis. dalam Y. Li & S. Zhang (Ed.), *Applied Research Methods in Urban and Regional Planning* (hlm. 149–165). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93574-0_8
- Menteri Perhubungan, R. I. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2021*.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & Aci, M. H. L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), Article 4.
- Muthiah, A. N., Nurjannah, A., Aulia, I., Kanaya, N. Y., Nst, T. A. A., & Susiana, S. (2024). Estimasi Rata-Rata dan Total Biaya Transportasi Mahasiswa Jurusan Matematika Unimed Menggunakan Metode Cluster Sampling. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16570>



- Novianty, F., & Firmansyah, S. (2020). Peran Dosen Program Studi PPKn dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 70–83. <https://doi.org/10.31571/pkn.v4i1.1793>
- Prasetyo, F. N., & Wirawan, A. (2021). Analisis Peningkatan Regulasi Aspek Transportasi pada Penyelenggaraan Kawasan Transit Oriented Development di Jabodetabek. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(2), 127–134. <https://doi.org/10.52920/jttl.v2i2.33>
- Rahman, E. Y., & Abdulkarim, A. (2024). Increasing Cultural Literacy in Social Studies Learning Through an Inquiry Reflective Thinking Approach. *Jurnal Pendidikan Ips*, 14(1), 155–163. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i1.1631>
- Saridewi, N. R., & Santoso, R. S. (2025). Difusi Inovasi Digitalisasi Pemerintahan: Penerapan Aplikasi Sapa Mbak Ita di Kota Semarang. *Nova Idea*, 2(2), 197–215. https://doi.org/10.14710/nova_idea.52727
- Sarumaha, B. S. (2024). Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Nias Selatan. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1446>
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyudi, A., Pitaloka, R. A., & Badayasa, A. (2025). Evaluasi Efektivitas Regulasi dalam Monopoli Transportasi Publik: Studi Persepsi Konsumen. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 1528–1536. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2119>
- Wijaya, I. G. D., Erowati, D., & Marlina, N. (2025). “Implementasi Kebijakan Biskita Trans Pakuan Bogor 2022-2023.” *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 694707.
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>
- Yanto, P., Jumanah, J., & Sutoto, S. (2024). Analysis Of the Implementation Of E-Participation in Public Policy in Indonesia: Potential, Challenges and Impact on the Quality of Public Policy. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 182–200. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3876>
- Yunus, A. I., Mukrim, M. I., Winarto, Y. R., Sarif, S., Hamzah, H., Uzda, R., Yulfadli, Z., Muslikah, S., Mubarak, H., Jamaluddin, J., & Amir, A. A. (2025). *Transportasi dan Perkerasan Jalan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.